



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.10.30.2/Kep. 62 -Bapperida/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH TAHUN 2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; ✓
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mendukung program/kegiatan inovasi;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pendanaan inovasi daerah, perlu ditetapkan pagu indikatif inovasi daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah, pemberian insentif bagi Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah berupa pagu indikatif inovasi daerah yang diberikan oleh Bupati untuk menghargai dan mendukung usaha pemerintah daerah dalam melakukan inovasi daerah, dan penetapan pagu indikatif inovasi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pagu Indikatif Inovasi Daerah Tahun 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pagu Indikatif Inovasi Daerah Tahun 2027, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pagu Indikatif Inovasi Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.10.30.2/Kep.62-Bapperida/2026

TANGGAL : 27 Februari 2026

TENTANG : PENETAPAN PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH TAHUN 2027

DAFTAR PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH TAHUN 2027

No	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH	POKOK KEBARUAN INOVASI
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Website Diujikan	Dinas Perhubungan	70.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran Online: Memungkinkan masyarakat untuk mendaftar dan memilih jadwal uji kendaraan dari mana saja asal terhubung dengan internet.2. Pemberitahuan berita hasil pemeriksaan melalui media WhatsApp: Memungkinkan pengiriman surat keterangan tidak lulus jika kendaraan tidak lulus melalui WhatsApp.3. Notifikasi masa berlaku uji melalui media WhatsApp Masyarakat akan menerima notifikasi masa berlaku uji, 30 hari sebelum masa berlaku uji habis.

				<p>4. Arsip berkas secara digital Arsip berkas tersedia secara digital, penggunaan sistem arsip digital dimulai dari pendaftaran online, pelaksanaan uji, hingga distribusi bukti lulus uji, menghilangkan ketergantungan pada dokumen kertas yang rentan rusak dan membutuhkan ruang penyimpanan besar.</p> <p>5. Info grafis layanan pengujian Ketersediaan visualisasi data (infografis dan data analytics) yang menampilkan metrik kinerja operasional secara aktual, memungkinkan pimpinan melakukan evidence-based policy making dan evaluasi kinerja instansi secara cepat.</p> <p>6. Sistem Tracking Real-time dengan Kode Lacak Fitur unggulan berupa Kode Lacak yang diberikan kepada setiap pemohon setelah pendaftaran, memungkinkan masyarakat memantau status proses pengujian (sedang diverifikasi/dalam antrian uji/sedang diuji/selesai) secara mandiri tanpa harus bertanya langsung ke petugas.</p>
2	Optimalisasi Pelayanan Akta Kematian Berbasis WhatsApp (PAKWA) di kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon	Kecamatan Plumbon	55.000.000	<p>1. Digitalisasi Berkas Tanpa Tatap Muka: Inovasi ini mengubah proses fisik menjadi digital sepenuhnya, di mana masyarakat cukup mengirimkan foto</p>

				<p>atau scan dokumen melalui WhatsApp tanpa perlu datang ke kantor kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pemanfaatan Platform Komunikasi Umum: Berbeda dengan aplikasi khusus yang memerlukan pengunduhan dan pendaftaran baru, layanan ini menggunakan WhatsApp yang sudah akrab digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada hambatan belajar (learning curve) bagi pengguna.3. Kecepatan Pemrosesan Data (Real-Time): Adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang menargetkan penyelesaian dalam waktu singkat memungkinkan verifikasi dan penerbitan dokumen dilakukan hampir seketika setelah data diterima.4. Efisiensi Biaya dan Waktu: Inovasi ini secara drastis memangkas "input biaya transportasi" dan waktu tunggu yang biasanya dialami masyarakat saat mengurus dokumen secara manual di kantor kecamatan .5. Sistem Layanan Proaktif (Jemput Bola Digital): Kebaruan lainnya adalah peluang integrasi dengan pihak rumah sakit atau desa, di mana akta kematian dapat diproses langsung sesaat setelah kejadian melalui koordinasi cepat via WhatsApp, sehingga keluarga tidak
--	--	--	--	---

				<p>perlu lagi terbebani administrasi di kemudian hari.</p> <p>6. Pengiriman Output Digital: Akta kematian dapat dikirimkan kembali kepada pemohon dalam format PDF (melalui email atau WhatsApp) yang dilengkapi tanda tangan elektronik, sehingga masyarakat dapat mencetaknya sendiri secara mandiri.</p> <p>7. Penggunaan PAKWA (Pelayanan Akta Kematian Berbasis WhatsApp) sangat relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang menuntut pelayanan cepat, akurat, transparan dan efisien.</p> <p>8. Memudahkan petugas pelayanan publik dalam memproses layanan akta kematian yang diajukan secara digital melalui PAKWA (Pelayanan Akta Kematian Berbasis WhatsApp).</p> <p>9. Meskipun dimungkinkan telah tersedia aplikasi yang serupa di tempat lain, hal ini menjadi benchmarking manakala beberapa fitur telah tersedia di sistem pelayanan yang serupa.</p>
3	Pengembangan Aplikasi SIWASPOKAR	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	70.000.000	<p>1. Pelaporan kejadian pemadaman dan penyelamatan berbasis real-time dari lokasi kejadian, Petugas dapat mengirimkan laporan langsung dari lapangan melalui perangkat digital, sehingga informasi kejadian diterima pusat komando secara cepat tanpa</p>

				<p>menunggu laporan manual setelah kembali ke pos.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Integrasi data operasional, armada, dan sarana prasarana dalam satu sistem terpadu, Aplikasi tidak hanya mencatat kejadian kebakaran dan penyelamatan, tetapi juga memuat status kesiapan unit, personel, serta kondisi sarana prasarana, yang sebelumnya masih tersebar di berbagai dokumen dan media terpisah.3. Dashboard monitoring dan log digital otomatis untuk pimpinan, Sistem menyediakan tampilan data operasional secara langsung (live dashboard) dan riwayat kegiatan terdokumentasi otomatis, sehingga pimpinan dapat melakukan pengawasan, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data aktual.4. Pengukuran kinerja layanan berbasis data sistem (data-driven performance), Inovasi ini memungkinkan penghitungan indikator kinerja seperti response time, frekuensi kejadian, dan distribusi beban kerja pos secara otomatis, yang sebelumnya belum terdokumentasi secara sistematis dan terukur.
--	--	--	--	--

4	Klasa Cerbon	Dinas Pendidikan	70.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Pendekatan Berbasis Zone of Proximal Development yang memaksimalkan potensi belajar murid dengan menargetkan area yang menantang namun dapat dicapai dengan bantuan yang berupa dukungan bertahap atau Scaffolding. Guru memberikan bantuan intensif di awal, lalu mengurangnya secara bertahap seiring meningkatnya kemampuan murid hingga mereka mandiri.2. Diagnosis klinis berbasis instrumen diagnostik dalam mengidentifikasi kebutuhan murid. Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pelaksanaan program dalam Klasa Cerbon berbasis data, bukan asumsi.3. Bentuk akomodasi yang diberikan pada murid disesuaikan pada kebutuhannya berupa intervensi/remedial (di Klinik Baca), habituasi/pembiasaan (di Gemesaku), dan produksi (di Simerak). Hal ini memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dalam gerakan literasi hanya karena memiliki hambatan teknis membaca.4. Transformasi peran guru menjadi role model. Pada pelaksanaan program terdapat keterlibatan aktif guru. Dalam program Gemesaku, guru wajib ikut membaca 1 buku/minggu, begitu pula
---	--------------	------------------	------------	---

				<p>dalam Simerak, guru ikut menulis karya.</p> <p>5. Program dan kegiatan literasi Klasa Cerbon tidak hanya berupa konsumsi pengetahuan, tetapi berupa dukungan sampai dapat menjadi produksi pengetahuan (Buku/Karya Tulis). Inovasi ini mengukur keberhasilan bukan hanya dari "berapa buku yang dibaca", tapi dari "bentuk akomodasi apa yang sesuai untuk murid", dan "berapa karya yang dihasilkan".</p>
5	Digitalisasi Piagam Penghargaan Kejuaraan Olahraga (DIGIPORA) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cirebon	Dinas Pemuda dan Olahraga	65.000.000	<p>1. Transformasi Validasi dari Visual-Based Menjadi System-Based Inovasi ini mengubah paradigma verifikasi keaslian piagam penghargaan yang sebelumnya mengandalkan pengamatan fisik seperti tanda tangan basah/stempel yang rentan dipalsukan menjadi validasi digital berbasis Quick Response Code (QR Code) yang terenkripsi dan terhubung secara real-time ke server pemerintah daerah. Ini memastikan keaslian data 100% akurat tanpa perlu proses tatap muka.</p> <p>2. Mekanisme End-to-End Control Berbeda dengan sistem lain yang hanya mendata sertifikat yang sudah ada, DIGIPORA menerapkan kontrol sejak fase "Izin Penyelenggaraan". Sistem menjamin bahwa hanya kejuaraan yang terdaftar dan disetujui oleh DISPORA yang dapat</p>

				<p>menerbitkan E-Sertifikat, sehingga menutup celah munculnya “sertifikat bodong” dari kejuaraan fiktif.</p> <p>3. Integrasi Sport Intelligence DIGIPORA tidak sekadar alat cetak sertifikat, melainkan berfungsi sebagai Single Source of Truth bagi prestasi olahraga daerah. Sistem ini secara otomatis membangun database rekam jejak atlet secara berkelanjutan yang dapat digunakan untuk talent scouting berbasis data, bukan lagi berbasis intuisi.</p> <p>4. Efisiensi Birokrasi Melalui Workflow Automation Sistem ini memangkas rantai birokrasi layanan legalisir dari 3 hari menjadi hitungan detik. Fitur “Data Pejabat Otomatis” menstandarisasi penandatanganan dokumen negara secara digital, menghilangkan ketergantungan pada keberadaan fisik pejabat di kantor, dan mendukung konsep Paperless Government.</p>
--	--	--	--	---

6	Ketok Pintu Cek Usia Lanjut (KEPINCUT) Guna Percepatan Skrining Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Pamengkang	Dinas Kesehatan	65.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Model Layanan Jemput Bola: Pelayanan skrining dilaksanakan secara door-to-door oleh kader kesehatan desa, sehingga tidak lagi bergantung pada kedatangan lansia ke puskesmas atau Posbindu. Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan layanan pada lansia dengan kendala mobilitas maupun hambatan geografis.2. Standarisasi SOP Skrining: Kader diberikan pelatihan sesuai standar untuk memastikan pelaksanaan skrining yang seragam dan berkualitas, mencakup: pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan lingkar lengan atas. Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan skrining lansia sederhana, tingkat kemandirian dan anamnesis perilaku beresiko.3. Monitoring Terstruktur: Kinerja kader dimonitor secara terjadwal melalui: pendampingan rutin oleh tim puskesmas, supervisi lapangan mingguan, dan pelaporan hasil skrining secara digital maupun manual. Pendekatan ini memastikan mutu layanan tetap konsisten dan progres dapat dipantau secara real-time.4. Sistem Tindak Lanjut: Lansia dengan faktor risiko, misalnya hipertensi tidak terkontrol, kadar gula darah tinggi, atau munculnya gejala komplikasi lain akan langsung dicatat sebagai kasus prioritas,
---	--	-----------------	------------	--

				segera dilaporkan ke puskesmas, dikonsultasikan dan ditindaklanjuti oleh dokter penanggung jawab.
7	Sekolah Siaga Kependudukan Jadikan Anak Mampu Berencana, Berkelanjutan dan Berkembang (SEGA JAMBLANG) dengan Pendekatan Sedulur Sinau Kependudukan Sekolah Siaga Kependudukan (SdSK) di Satuan Pendidikan Tingkat SD dan SMP Sederajat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pendamping dan Monitoring Kegiatan merupakan Sekolah yang sudah menjadi SSK Paripurna berdasarkan SK Kemendukbangga dan SK Bupati. 2. Sasaran yang akan didampingi dan di Monitoring adalah sekolah yang belum terinformasikan dan terbentuk SSK. 3. Penggunaan Tema Sedulur Sinau Kependudukan (SdSK) menggunakan bahasa daerah Kabupaten Cirebon yang artinya "Teman Belajar Kependudukan". 4. Metode yang digunakan merupakan pengembangan dari kegiatan pengimbasan kegiatan yang sudah ada tetapi lebih tertata dan dilakukan berkesinambungan dengan metode pendekatan teman belajar sehingga sekolah yang diimbas bisa menjadi SSK Paripurna.
8	Pertunjukan Kreasi Seni sebagai Atraksi Daya Tarik Kunjungan Wisatawan di Industri Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	70.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seni pertunjukan khas Cirebon lebih dikenal melalui Industri-industri Pariwisata. 2. Wisatawan bisa mengenal identitas budaya khas Cirebon langsung melalui industri pariwisata di Cirebon.

				<p>3. Tampilan-tampilan seni yang rutin di industri pariwisata bisa menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Cirebon.</p> <p>4. Wisatawan bisa membeli paket wisata melalui industri-industri pariwisata di Cirebon.</p>
9	PEPES LAUK PEDAS LAN REBON (Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengelola Akuntansi dan Pelaporan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	60.000.000	<p>1. Pedoman Teknis Daerah yang Aplikatif dan Kontekstual PEPES LAUK PEDAS LAN REBON menghadirkan pedoman penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan riil perangkat daerah Kabupaten Cirebon, sehingga mudah dipahami dan langsung dapat diimplementasikan.</p> <p>2. Standarisasi Penerapan SAP secara Menyeluruh Inovasi ini menyatukan pemahaman dan praktik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di seluruh perangkat daerah, mengurangi perbedaan interpretasi, kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kualitas rekonsiliasi dan konsolidasi LKPD.</p> <p>3. Penguatan Kapasitas ASN Berbasis Pembelajaran Berkelanjutan Kebaharuan terletak pada integrasi pedoman teknis dengan Intensive Course, coaching, sehingga pengembangan kompetensi tidak bersifat sesaat tetapi berkelanjutan.</p> <p>4. Transformasi dari Ketergantungan Eksternal menuju Kemandirian Internal</p>

					Inovasi ini menggeser pola pendampingan dari penggunaan tenaga ahli eksternal menjadi penguatan kompetensi ASN, menghasilkan efisiensi anggaran dan keberlanjutan kualitas laporan keuangan.
10	One Stop System Rekonsiliasi Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon	Badan Keuangan dan Aset Daerah		60.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi (OSS Sida Katon) dapat menghadirkan fitur-fitur baru yang belum ada di aplikasi serupa.2. Aplikasi (OSS Sida Katon) menggunakan pendekatan yang belum pernah diterapkan sebelumnya untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.3. Aplikasi (OSS Sida Katon) dapat mengadaptasi ide-ide dari aplikasi lain, namun memberikan nilai tambah yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.4. Aplikasi (OSS Sida Katon) dapat menawarkan solusi baru untuk masalah dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada perangkat daerah.
11	Oprimalisasi Manajemen Pembuatan Kartu Pencari Kerja Melalui Pengembangan Pelayanan Grebek Layak/I	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon		70.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan antrian digital bagi pembuat AK/I.2. Layanan keliling bagi yang jauh dari kantor Disnaker.3. Weekend Service.

12	Pengembangan Inovasi Empal Gentong Melalui Toko Pangan Lokal Katon Foodmart Sebagai Etalase Produk Unggulan Daerah & Pengendalian Inflasi	Sekretariat Daerah	60.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Integrasi Pengendalian Inflasi dari Hulu hingga Hilir dalam Satu Kerangka Inovasi Daerah.2. Pemanfaatan Indeks Perubahan Harga (IPH) sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Operasional.3. Toko Pangan Lokal Katon Foodmart sebagai Instrumen Permanen Pengendalian Inflasi.4. Kolaborasi Multi-Stakeholder yang Terinstitusionalisasi.5. Optimalisasi Pasar Rakyat sebagai Simpul Pengendalian Inflasi.
13	Akselerasi Pencairan Belanja Kegiatan Berbasis Digital yang CERIA (Cepat, Efisien, Responsif, Integratif dan Akuntabel) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon	65.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Integrasi proses pencairan belanja kegiatan dalam satu sistem digital terpadu.2. Penerapan alur kerja (workflow) digital berjenjang berbasis peran.3. Pemanfaatan notifikasi dan checklist digital untuk meningkatkan responsivitas.4. Dashboard monitoring realisasi belanja kegiatan secara real time.5. Penerapan arsip digital dan jejak audit (audit trail) yang terdokumentasi.6. Pendekatan CERIA sebagai nilai operasional inovasi
14	Aplikasi e-Rekam Medis Terintegrasi	RSUD Arjawinangun	85.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan aplikasi E-Rekam Medis yang dirancang secara khusus untuk

				<p>mengakomodasi struktur, format, dan alur rekam medis manual yang selama ini digunakan di RSUD Arjawinangun.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Integrasi fungsional aplikasi E-Rekam Medis dengan SIMRS GOS, tanpa menggunakan modul E-Rekam Medis eksisting yang belum sesuai kebutuhan, sehingga tetap menjaga kesinambungan data pelayanan dan administrasi rumah sakit.3. Penyesuaian elemen pencatatan klinis dengan standar pelayanan medis, keselamatan pasien, dan kebutuhan akreditasi rumah sakit.4. Fleksibilitas sistem dalam mengadaptasi perubahan kebijakan, standar klinis, dan kebutuhan pelayanan tanpa mengganggu operasional SIMRS GOS yang telah berjalan.5. Pemanfaatan aplikasi E-Rekam Medis sebagai jembatan transisi dari rekam medis manual menuju rekam medis elektronik yang terstandar dan berkelanjutan.6. Keselarasan inovasi dengan kebijakan transformasi digital kesehatan nasional serta penerapan Sistem Pemerintahan
--	--	--	--	---

				Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
15	Rusa Lavender	Kecamatan Sedong	60.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang sampah estetik, informatif, edukatif, dan motivatif.2. Ruang sampah yang bersih, bebas lalat/nyamuk walaupun ada sampahnya3. Ditempatkan di depan sebagai display.4. Beberapa dijadikan tempat swafoto/selfie.5. Adanya komitmen bersama antara Camat dan Kepala Desa, untuk melaksanakan Rusa Lavender.6. Menjadi media kampanye persampahan.

BUPATI CIREBON,



IMRON